

SKRIPSI

**Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2020**

(Studi Kasus Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara)



OLEH:

DESY LESTARI
NIM. 217130034

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA
BUMIKABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2020**

(Studi Kasus Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara)

Oleh:

DESY LESTARI

Telah Dipertahankan Didepan Penguji
Pada Tanggal 13 Februari 2021
Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Menyetujui

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

NIDN. 0806066801


Ilham Zitri, S.IP., M.IP

NIDN.0817119102

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP

NIDN: 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA
BUMIKABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2020**

(Studi Kasus Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara)

Oleh:

DESY LESTARI

Telah Dipertahankan Didepan Penguji
Pada Tanggal 13 Februari 2021
Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim Penguji

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**

NIDN.0806066801

Ketua

2. **Ilham Zitri, S.IP., M.IP**

NIDN.0817119102

Anggota

3. **Drs. Amil, M.M**

NIDN.0831126104

Anggota

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO.20 TAHUN 2003, PASAL 25 AYAT 2 DAN 70).

Mataram, Februari 2021

Mahasiswa,

Desy Lestari
217130034





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Lestari
NIM : 217130034
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung, 10 - Desember - 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 081975747556 / desylestari@gmail.com
Judul Penelitian : -

Implementasi Kebijakan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok utara 2020
(Studi kasus Desa Gondang, Kecamatan Gangga)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 100%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 01/03/2021

Penulis



Desy Lestari
NIM 217130034

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Lestari
NIM : 217130034
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung, 10-Desember-1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 081775747556 / desyllestari@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara tahun 2020
(Studi Kasus Desa Gordang, Kecamatan Gangga)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 01/03/2021

Penulis



Desy Lestari
NIM. 217130034

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

” The power of sugesti, membawa pikiran kearah positif dalam melakukan segala sesuatu dengan keyakinan penuh terhadap Allah Swt. Jika salah ambil pelajarannya. Sehingga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi”



UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
2. Kedua Orang Tua, Mamak Istianah dan Bapake Irpan Takdir serta kedua kakak dan kedua adik yang tercinta selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis baik dalam bentuk fisik maupun financial.
3. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr.H. Muhammad Ali, M.Si.
5. Bapak AyatullahHadi, S.IP, M.IP selaku Ketua Jurusan ProgramStudi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. selaku Dosen pembimbing I Studi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Ilham Zitri, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing II Studi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Mataram, Februari 2021

Desy lestari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat Hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Impelementasi Kebijakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara (studi kasus Desa Gondang, kecamatan Gangga)”**. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata-1 Pada program studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun skripsi, peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang kebijakan dan penerapan di lapangan serta bisa di kembangkan lagi lebih lanjut.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Mataram, Februari 2021
penyusun

Desy Lestari
NIM. 217130034

ABSTRAK

Bencana alam merupakan bencana yang tidak bisa diprediksi oleh manusia, seperti bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 di Kabupaten Lombok Utara mengakibatkan banyak kerusakan berbagai sektor kegiatan masyarakat serta bangunan mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga pemerintah disini memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan perbaikan dalam penanggulangan bencana gempa bumi. Sesuai dengan Inpres No.5 Tahun 2018 tentang percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana gempa bumi lombok mempunyai target dalam penyelesaian pelaksanaannya yaitu bangunan rumah masyarakat selesai rampung pada Desember 2019, namun sampai pada tahun 2020 program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum terselesaikan. Berdasarkan hal yang melatarbelakangi dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi kebijakan pemerintah daerah (BPBD) terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten Lombok Utara, (2) kendala apa saja yang menjadi penghambat program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan jumlah responden 34 orang serta yang dibuktikan dengan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan program harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya menjalankan sebuah program, dalam penelitian ini sumber daya manusia tidak efektif, keratannya pelaksana sebagian tidak tepat, sikap yang diambil standar serta komunikasi yang kurang baik antar pelaksana. Dari hal tersebut muncul kendala-kendala yang menghambat proses penyelesaian program yaitu pendanaan, bahkan kendala pada pelaksanaannya. Sehingga BPBD membuat kebijakan salah satunya untuk memudahkan masyarakat dalam proses administrasi agar memiliki data lengkap.

Kata Kunci: Kebijakan; Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

**POLICY IMPLEMENTATION OF REHABILITATION AND
RECONSTRUCTION PROGRAMS IN THE POST EARTHQUAKE
DISASTER IN NORTH LOMBOK REGENCY, 2020
(A CASE STUDY AT GONDANG VILLAGE, GANGGA DISTRICTS)**

Desy Lestari

Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

Natural disasters cannot be predicted by humans, such as the earthquake in 2018 in North Lombok Regency. It resulted in a lot of damage to various sectors of community activities, and buildings suffered quite severe damage. Therefore the government must carry out protection and repairs in earthquake disaster response. The Presidential Instruction No.5 of 2018 concerning Rehabilitation and Reconstruction's acceleration after the Lombok earthquake disaster has a target in completing its implementation, namely the completion of community buildings in December 2019. In fact, until 2020, the rehabilitation and reconstruction program has not been met. Based on the background in the preparation of this research. This study aims to determine the implementation of local government policies (BPBD) on the post-earthquake rehabilitation and reconstruction program in North Lombok Regency. Also, to determine the obstacles post-earthquake rehabilitation and reconstruction program in North Lombok Regency. The research was conducted using descriptive qualitative methods. Data collection was carried out through direct observation of the research location, interviews with 34 respondents, and documentation data.

The results show that in the implementation of program policies, some factors influence the program's success or failure. Human resources are ineffective, partly inaccurate characteristics of executors, standard attitudes, and poor communication between implementers in this study. There emerged obstacles that hindered completing the program, namely data collection, funding, and even constraints on the implementer. Therefore, BPBD makes policies, one of which is to facilitate the community in the administrative process to have complete data.

Keywords: Policy; Rehabilitation and Reconstruction.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR BEBAS PLAGIALISME	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO HIDUP	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
SUMMARY	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan	7

1.4.Manfaat	7
1.4.1.Manfaat Teoritis	7
1.4.2.Manfaat Praktis.....	8
1.4.3.Manfaat Akademik.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1.Penelitian Terdahulu.....	9
2.2.Landasan Teori	15
2.2.1.Implementasi.....	15
2.2.2.Model Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.2.3.Rehabilitasi dan Rekonstruksi	19
2.2.4.Bencana Alam.....	21
2.3.Kerangka Berpikir.....	22
2.4.Teori Konseptual dan Operasional.....	23
2.4.1.Definisi konseptual	23
2.4.2.Definisi Operasional	24
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	26
3.1.Metode Penelitian.....	26
3.2.Lokasi Penelitian.....	27
3.3.Sumber Data.....	27
3.3.1.Data Primer	28
3.3.2.Data Sekunder.....	29
3.4.Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4.1.Observasi	29
3.4.2.Wawancara.....	30
3.4.3.Dokumentasi	31
3.5.Teknik Analisis Data	31
3.5.1.Tahap Pengumpulan Data	32
3.5.2.Penyajian Data.....	32

3.5.3.Reduksi Data.....	32
3.5.4.Menarik Kesimpulan/Verifikasi.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1.Letak Geografi, Topografi, dan Demografi Desa	33
4.1.2.Kondisi Pemukiman Desa Gondang Pasca Bencana Gempa ...	36
4.1.3.Keadaan Pertanian.....	38
4.1.3.1. Luas Wilayah	38
4.1.3.2. Penggunaan Tanah	38
4.1.3.3. Hasil-Hasil Produksi Pertanian.....	38
4.1.4.Keadaan Penduduk.....	40
4.1.5.Kondisi masyarakat Desa Gondang.....	42
4.1.6.Keadaan Sosial dan Budaya.....	43
4.1.7.Fasilitas Pemerintahan dan Pembangunan.....	45
4.1.8.Administrasi Desa, Kelembagaan Dan Struktur OrganisasiDesa.....	46
4.2.Pembahasan.....	49
4.2.1.ImplementasiKebijakan Program Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi	49
4.2.1.1.Sumber Daya Manusia Sebagai Pelaksana Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi	50
4.2.1.2.Karakteristik Agen Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	56
4.2.1.3. Sikap dan Kecendrungan Para Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	60
4.2.1.4.Komunikasi Antara Organisasi Pelaksana dan Aktivitas Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	68
4.2.2.Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat (pokmas) selama program Rehabilitasi dan Rekostruksi	76

BAB V PENUTUP	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	946



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Rumah Masyarakat Rusak Berdasarkan Kategori	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.2 Definisi Operasional.....	25
Tabel 3.1. Data Narasumber Atau Informan.....	29
Tabel 3.2. Data Narasumber Dan Informan	31
Tabel 4.1. Pendidikan Masyarakat Desa Gondang.....	40
Tabel 4.2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gondang	41
Tabel 4.3. Jumlah Keadaan Penduduk Dilihat Dari Mkck	42
Tabel 4.4. Jumlah Bagunan Fasilitas Desa Gondang	45
Tabel 4.5. Pegawai Bpbd Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	52
Tabel 4.6. Jumlah Bangunan Rumah Masyarakat Belum Selesai Desa Gondang	64
Tabel 4.7. Data Usulan Rumah Masyarakat Desa Gondang.....	72
Tabel 4.8. Anggaran Pendampingan Percepatan Rehabilitai Dan Rekonstruksi Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2020	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Wilayah Desa Gondang.....	35
Gambar4.2.Kondisi Pemukiman masyarakat Desa Gondang Pasca Gempa Bumi Tahun 2018	36
Gambar 4.3. Rumah Tahan Gempa Model RIKO	38
Gambar 4.4. Dokumentasi Rapat Koordinasi BPBD dengan Stakeholder	70



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Beripikir.....	23
Bagan 4.1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gondang.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

1. Anggaran Pendapatan (APBD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2. Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk sebagai wilayah yang rawan terhadap berbagai kejadian bencana alam yang dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia (perbuatan manusia). Kejadian-kejadian bencana di Indonesia telah mengakibatkan berbagai dampak, termasuk diantaranya kerusakan fisik, ekonomi dan sosial. Jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana fisik, serta kerugian ekonomi telah melumpuhkan kehidupan masyarakat yang selamat dari bencana (Sagala *et al.* 2013). Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah Gempa Bumi, seperti yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Pulau Lombok, dimana daerah tersebut menjadi kawasan seismik aktif yang rawan terhadap potensi guncangan bencana gempa bumi. Hal tersebut dikarenakan Pulau Lombok terletak diantara pembangkit gempa dari selatan dan utara.

Proses pemulihan pasca bencana menjadi fase yang penting dalam mengembalikan kehidupan masyarakat pasca bencana, yaitu dengan membangun kembali kehidupan masyarakat melalui pengurangan kerentanan dan meningkatkan kapasitas untuk menghindari risiko bencana di masa depan (Sagala *et al.* 2013). Bencana Gempa Bumi yang saat itu berkekuatan 7.0 SR pada tanggal 5 Agustus 2018 mengakibatkan banyak kerusakan berbagai sektor pada kegiatan masyarakat, Gempa yang menimbulkan korban jiwa dan

menyebabkan bangunan mengalami kerusakan cukup berat, berada pada wilayah Lombok Utara. Seperti yang terjadi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga.

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan antara lain bahwa “Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”. Dalam pernyataan ini mempunyai makna, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman resiko, termasuk dampak bencana. Sejalan dengan tujuan konstitusi yang telah disebutkan di atas, maka merupakan suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang dimuat pada suatu lingkup pengelolaan bencana yang efektif dan efisien, dalam hal ini penanggulangan bencana Gempa Bumi (Sigarlaki. *et al.* 2017).

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun masyarakat. Pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi melibatkan beban berbagai pihak yang menyediakan sumber daya baik pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah melalui Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat di capai melalui koordinasi antara instansi/lembaga yang terkait, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah(Sigarlaki. *et al.* 2017).

Masyarakat korban gempa bumi saat itu tinggal ditempat penampungan. Setelah itu mereka memerlukan perbaikan atau membangun kembali rumah mereka yang rusak berat atau bahkan runtuh. Saat itu banyak pihak yang tergerak untuk memberikan bantuan rumah kepada para korban. Seperti bantuan rumah Hunian Sementara yang dibangun oleh lembaga MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) yaitu merupakan sebuah lembaga Muhammadiyah yang bertugas untuk mengkoordinasikan mobilisasi sumberdaya dalam Tanggap Darurat Bencana, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana dan Rehabilitasi Pasca Bencana. Adapun yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap) yaitu organisasi nirlaba profesional yang memfokuskan kerja-kerja kemanusiaan pada penanggulangan bencana mulai fase darurat sampai dengan fase pemulihan pasca-bencana.Serta yayasan ataupun lembagasosial lainnya.

Sementara itu, mengingat cuaca seperti musim hujan membuat rumah sementara tidak akan bertahan lama. Maka dari itu, guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), sejak 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No.5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Gempa Bumi Lombok. Di dalam instruksi presiden tersebut, target waktu penyelesaian

rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian seperti pasar selesai paling lambat Desember 2018. Kemudian, untuk rumah masyarakat paling lambat rampung pada Desember 2019. (<https://kabar24.bisnis.com/rehabilitasi-dan-rekonstruksi-ntb-lambat>).

Berdasarkan data yang didapatkan dari pemerintah Desa Gondang sebanyak 3.298 rumah yang terdampak gempa bumi dari semua kategori yaitu rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan termasuk dengan data hilang.

Tabel 1.1
Jumlah rumah Masyarakat Rusak berdasarkan Kategori

O	DUSUN	RB	RR	RS
1	KARANG KATES	207	94	20
2	LEKOK SELATAN	34	47	58
3	LEKOK UTARA	73	12	33
4	LEKOK TIMUR	151	80	6
5	LEKOK TENGGARA	50	72	8
6	KARANG BEDIL	316	44	26
7	KARANG AMOR	149	35	9
8	KARANG PENDAGI	295	98	91
9	KARANG ANYAR	241	20	9
10	GONDAG TIMUR	364	34	9
11	BESARI	79	3	8
12	DATA HILANG	335	132	56
JUMLAH		2294	671	333

Sumber data : Diolah dari Arsip Pemerintah Desa Gondang.

Berdasarkan data jumlah rumah masyarakat yang rusak berdasarkan kategori (Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan) maka di Desa Gondang hampir seluruh dusun terkena oleh dampak dari Bencana Gempa Bumi. Seperti yang terjadi di Dusun Karang Kates ada 207 rumah rusak berat, 94

rusak sedang dan 20 rusak ringan. Sementara itu di Dusun Lekok Selatan 34 rumah rusak berat, 47 rusak sedang dan 58 rusak ringan. Dusun Lekok Utara rumah sebanyak 73 rusak berat, 12 rusak ringan dan 33 rusak sedang. Dusun Lekok Timur 151 rumah rusak berat, 80 rusak ringan dan 6 rumah yang rusak sedang. Dusun Lekok Tenggara 50 rumah rusak berat, 72 rusak ringan dan 8 rusak sedang.

Selanjutnya ada juga di Dusun Karang Bedil yaitu sebanyak 316 rumah rusak berat, 44 rusak ringan dan 26 rusak sedang. Dusun Karang Amor ada 149 rumah rusak berat, 35 rusak ringan dan 9 rusak sedang. Dusun Karang Pendagi 295 rumah rusak berat, 98 rusak ringan dan 91 rusak sedang. Dusun Karang Anyar 364 rumah rusak berat, 20 rusak ringan dan 9 rusak sedang. Dusun Gondang Timur rumah rusak sebanyak 364 rusak berat, 34 rusak ringan dan 9 rusak sedang. Yang terakhir ada Dusun Besari yaitu 79 rumah rusak berat, 3 rusak ringan dan 8 rusak sedang.

Sementara itu ada juga jumlah data yang hilang sebanyak 335 rumah rusak berat, 132 rumah rusak ringan dan 56 rumah rusak sedang. Hal tersebut dikarenakan data yang sudah di kirim sebelumnya disortir lagi oleh pihak inspektorat pusat sehingga banyak data nama-nama warga yang hilang. Meski merujuk pada instruksi Presiden, namun sampai saat ini 3 tahun berlangsung selama pasca Gempa Bumi rumah masyarakat belum dapat terselesaikan semua, dikarenakan beberapa faktor yaitu dalam hal pendataan atau administrasi, Sehingga menyebabkan beberapa kali data berubah. Selain itu, pemerintah memberi keluasaan bagi masyarakat untuk memilih proses

pembangunan hunian bisa dengan swa-kelola, juga boleh menggunakan aplikator. Namun demikian, banyak pokmas yang tidak memilih swa-kelola dan mayoritas masyarakatnya menggunakan bantuan aplikator. Bahkan ada beberapa masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga atau aplikator tersebut hanya dengan menerima kunci rumah tanpa perlu sibuk dalam proses pembangunan rumah hunian atau rumah tahan gempa (RTG).

Hal tersebut menimbulkan pemahaman yang salah ditengah masyarakat terkait dengan menggunakan aplikator. Sehingga membuat terhambatnya pembangunan rumah masyarakat. Terdapat usulan baru dari pihak pemerintah desa yang belum diverifikasi dan validasi berdasarkan laporan masyarakat kepada Pemerintah Desa Gondang, pertanggal 15 November baru 25 rumah yang melapor. Sementara itu surat keputusan (SK) tentang penetapan penerimaan rumah rehabrekon pasca Gempa Bumi ke 26 dan 27 yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara, sampai saat ini masih belum keluar rekening disebabkan karena tuntutan pusat harus menyelesaikan Laporan PertanggungJawaban (LPJ) dari pemerintah daerah yang dimulai dari tahap 1 sampai pada tahap 25. Adapun perpanjangan kontrak fasilitator tersendat sehingga berdampak langsung pada proses pendampingan, efek dari keterlambatan gaji. Namun saat ini hal tersebut sudah bisa diatasi oleh Pemerintah Daerah Lombok Utara.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah daerah khususnya di Desa Gondang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Kebijakan Pemerintah daerah terhadap program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Gempa bumi di desa Gondang Kecamatan Gangga kabupaten Lombok utara ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dan Pokmas, sehingga Program rehabilitasi dan Rekonstruksi belum selesai ?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pemerintah daerah terhadap program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Gempa bumi di desa Gondang Kecamatan Gangga kabupaten Lombok utara
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah dan Pokmas, sehingga Program rehabilitasi dan Rekonstruksi belum selesai

1.4. Manfaat

Manfaat penelitian antara lain adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a) Makin bertambahnya ilmu pengetahuan mengenai bencana dan proses rehabilitasi rekonstruksi rumah berdasarkan swakelola.

- b) Penelitian ini sebagai masukan bagi pemerintah akan pentingnya kesiapan dalam menghadapi bencana, khususnya pemerintah desa sehingga masyarakat mampu dalam memahami proses berbasis swakelola.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat, Pentingnya untuk memahami program pemerintah terlebih dahulu sebelum menjalankan program itu sendiri serta mengetahui dampak apa saja apabila mereka menjalankan program tersebut.
- b) Bagi pemerintah desa, sebagai pertimbangan pentingnya untuk menyiapkan aplikasi terpercaya dalam membantu program rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis swakelola masyarakat, serta memberikan pemahaman se jelas mungkin agar persepsi masyarakat dan pemerintah bisa berjalan beriringan.

1.4.3. Manfaat Akademik

- a) Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Sarata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Selain itu, jenis penelitian, metode penelitian dan temuan serta kesimpulan dari penelitian terdahulu dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan. Dengan demikian dapat dengan mudah bagi peneliti untuk menemukan posisi penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Desa Gondang Lombok Utara)”.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

1.	Nama	Natasia Thalia Sigarlaki, Sarah Sambiran, Dan Trintje Lambe.
	Judul	Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi Korban Banjir di Kota Manado (Study kasus Kecamatan Paal Dua)
	Hasil	Penelitian ini menerangkan bahwa pentingnya membahas bagaimana tahapan pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai dengan sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi, penyaluran dana Rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali serta Pertanggung Jawaban.
	Perbedaan	Perbedaan dalam penelitian ini dengan apa yang penulis teliti yaitu bedanya terdapat pada fokus bencana yang terjadi. Serta dalam penelitian ini tidak membahas pengontrolan pemerintah terhadap pelaksanaan program.
	Critical Point	Dalam penulisan ini tidak adanya tahun penulisan. Serta tidak ada tinjauan ulang (saran) hanya ada kesimpulan, sehingga pembaca yang ingin meneliti penelitian yang sejenis tidak dapat menemukan rujukan lebih lanjut mengenai apa yang harus ditambahkan dari jurnal ini. Tahun penulisan pada jurnal ini juga tidak di cantumkan.
2.	Nama	Saut Sagala, Fernando Situngkir, Ramanditya Wimbarda
	Judul	Interaksi Aktor dalam Rekonstruksi Rumah Pasca bencana Gempa Bumi. 2013
	Hasil	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai

		proses interaksi berbagai aktor yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi perumahan di Kecamatan Pangalengan sebagai dampak gempa bumi Jawa Barat pada 2009.
	Perbedaan	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dalam penelitian ini tidak membahas proses pelaksanaan dari adanya program pemulihan rumah akibat bencana gempa bumi. Tapi lebih kepada tanggungjawab dari pada interaksi aktor yang terkait.
	Critical Point	Dalam penelitian ini penulis sering menggunakan kalimat atau yang sama maknanya dalam baris tulisan sehingga dalam membaca seringkali membuat bingung. Serta tidak adanya di tuliskan studi kasus pada judul.
3.	Nama	Saut A. Sagala, Dian Lutfiana dan Ramanditya Wimbardana
	Judul	Manajemen Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Jawa Barat: Studi Kasus Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
	Hasil	Penelitian menerangkan bahwa adanya beberapa aspek yang menjadi fokus pemulihan yaitu perumahan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, sosial-psikologi dan pelayanan publik. Pada penelitian kali ini, pembahasan akan difokuskan pada aspek perumahan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain: partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, aspek finansial serta proses rekonstruksi yang bersifat berkelanjutan.
	Perbedaan	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dalam penelitian ini, bedanya dalam penelitian ini memfokuskan pada partisipasi masyarakat sedangkan penulis membahas bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan untuk membantu masyarakat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi
	Critical Point	Tidak adanya tahun penulisan. Serta tidak ada saran hanya ada kesimpulan.
4.	Nama	Meita Lefi Kurnia
	Judul	Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. penelitian ini dibuat pada tahun 2017.
	Hasil	Hasil penelitian ini nantinya akan menunjukkan bahwa kajian yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan Pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
	Perbedaan	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dalam penelitian ini perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas secara menyeluruh mulai dari penanggulangan hingga pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan teori <i>freies ermessen</i> . Sedangkan penulis melihat indikator-indikator berdasarkan teori implementasi.
	Critical Point	Dalam penulisan ini tidak terdapat adanya saran, hanya ada kesimpulan. Serta beberapa kalimat ada yang memiliki makna yang sama.
5.	Nama	Syifa Azmy Khoirunnisa, Hardi Warsono, Margaretha Suryaningsih
	Judul	Kinerja Pemerintah Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kawasan Rawan Bencana (KRB) Di Kabupaten Magelang.
	Hasil	penelitian ini membahas beberapa indikator yang dimana meliputi efektivitas, efisiensi, keadilan, dan daya tanggap.
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu berbeda dari pandangan teori serta indikator yang digunakan.
	Critical Point	Pada penelitian ini tidak membahas keterkaitan kinerja pemerintah di wilayah tersebut dengan indikator-indikator. Tidak adanya saran

		serta tidak adanya tahun penulisan.
6.	Nama	Kartika, Azhar Mu'alim, dan Riski Fadhilah
	Judul	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya
	Hasil	Hasil dari penelitian ini membahas bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan mitigasi, dimana ada beberapa hal penting yang difokuskan terdiri dari 4 faktor yaitu; (1) tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana, (2) sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, (3) mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, (4) mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul.
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu perbedaannya adalah pada fokus penulisan. Serta bahan dan metode penulisan yang berbeda.
	Critical Point	Pada penelitian ini tidak terdapat tahun penulisan, tidak dijelaskan pula teori dari implementasi secara terlebih dahulu.
7.	Nama	Christo Imanuel Londok
	Judul	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Suatu Studi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)
	Hasil	Hasil penelitian yaitu membahas tingkat keberhasilan implementasi kebijakan terhadap penanggulangan bencana yang difokuskan pada teori Edward III yaitu antara lain: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi.
	Perbedaan	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dalam penelitian ini melihat penanggulangan secara keseluruhan. Serta teori yang digunakan pun berbeda dengan penulis.
	Critical Point	Dalam penulisan ini tidak terdapat tahun penulisan.
8.	Nama	Himawan Indarto, Ferry Hermawan
	Judul	Mekanisme Kebijakan Standar Ketahanan Gempa Baru Pada Bangunan Publik. Penelitian ini dibuat pada tahun 2017.
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberhasilan penerapan standar gedung tahan gempa baru dipengaruhi oleh mekanisme komunikasi dan pengalaman kontraktor yang memadai pada eksekusi di lokasi.
	Perbedaan	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dalam penelitian ini berfokus pada ketahanan bangunan sedangkan penelitian fokus pada aplikator yang terlibat dalam program rehabrekon.
	Critical Point	Dalam penulisan ini tidak adanya studi kasus pada judul. Tidak adanya saran. Serta beberapa kalimat ada yang memiliki makna yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2.1 di atas, maka penulis mengemukakan hasil penelitian terdahulu. *Pertama* adalah penelitian dengan judul “Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir di kota Manado (study kasus kecamatan paal dua) oleh Natasia Thalia Sigarlaki, Sarah Sambiran, Dan Trintje Lambe”. Kesimpulan peneliti adalah tahapan

pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai dengan sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi, penyaluran dana Rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali serta pertanggung jawaban. Adapun Perbedaan dalam penelitian ini dengan apa yang penulis teliti yaitu bedanya terdapat pada fokus bencana yang terjadi. Serta dalam penelitian ini tidak membahas pengontrolan pemerintah terhadap pelaksanaan program.

Penelitian kedua yaitu dengan judul “Interaksi Aktor dalam Rekonstruksi Rumah Pascabencana Gempa Bumi oleh Saut Sagala, Fernando Situngkir, Ramanditya Wimbarda pada tahun 2013”. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dalam penelitian ini tidak membahas proses pelaksanaan dari adanya program pemulihan rumah akibat bencana gempa bumi. Tapi lebih kepada tanggung jawab dari pada interaksi aktor yang terkait. Kesimpulan peneliti adalah harus adanya kejelasan proses interaksi dari berbagai aktor yang terlibat dalam rekonstruksi rumah, baik pemerintah, stakeholder dan masyarakat.

Penelitian *ketiga* dengan judul “Manajemen Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Jawa Barat: Studi Kasus Kabupaten Bandung, Jawa Barat oleh Saut Sugala, dkk”. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dalam penelitian ini, bedanya dalam penelitian ini memfokuskan pada partisipasi masyarakat sedangkan penulis membahas bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan untuk membantu masyarakat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kesimpulan para peneliti tersebut adalah adanya beberapa aspek yang menjadi fokus pemulihan yaitu perumahan, ekonomi,

lingkungan, infrastruktur, sosial-psikologi dan pelayanan publik. Dimana peneliti juga memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekonstruksi yang bersifat berkelanjutan.

Penelitian *keempat* yaitu dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat oleh Meita Lefi Kurnia tahun 2017”. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dalam penelitian ini perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas secara menyeluruh mulai dari penanggulangan hingga pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan teori *freies ermessen*. Sedangkan penulis melihat indikator-indikator berdasarkan teori implementasi. Kesimpulan peneliti adalah bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan Pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan teori kesejahteraan masyarakat sehingga terlihat kebijakan pemerintah yang digunakan dalam mtercapainya kesejahteraan masyarakat dampak dari bencana gempa bumi tersebut.

Pada penelitian berikutnya yaitu penelitian *kelima* mengangkat judul “Kinerja Pemerintah Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kawasan Rawan Bencana (KRB) Di Kabupaten Magelang oleh Syifa Azmy Khoirunnisa, dan dkk”. Kesimpulan dari peneliti adalah kinerja pemerintah dalam rehabilitasi dan reknstruksi tidak terlepas pada beberapa indikator yaitu meliputi efektivitas, efisiesi, keadilan dan daya tanggap. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu berbeda dari pandangan teori serta indikator yang

digunakan. Penelitian *keenam* dengan Judul “Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya oleh Kartika, Azhar Mu’alim, dan Riski Fadhilah”. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu perbedaannya adalah pada fokus penulisan. Serta bahan dan metode penulisan yang berbeda. Kesimpulan penelitian tersebut adalah terdapat beberapa hal penting yang menjadi faktor-faktor implementasi kebijakan mitigasi, seperti tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana, (2) sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, (3) mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, (4) mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul.

Penelitian *ketujuh* dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Suatu Studi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara) oleh Christo Imanuel Londok”. Kesimpulan penelitian ini melihat tingkat keberhasilan implementasi kebijakan terhadap penanggulangan bencana berdasarkan teori Edward III (komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi). Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dalam penelitian ini melihat penanggulangan secara keseluruhan. Serta teori yang digunakan pun berbeda dengan penulis. Terakhir yaitu Penelitian *kedelapan* mengangkat Judul Mekanisme Kebijakan Standar Ketahanan Gempa Baru Pada Bangunan oleh Himawan Indarto, Ferry Hermawan pada tahun 2017”. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dalam penelitian ini berfokus pada ketahanan bangunan sedangkan penelitian

fokus pada aplikator yang terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kesimpulan dari peneliti adalah keberhasilan penerapan standar gedung tahan gempa baru dipengaruhi oleh mekanisme komunikasi dan pengalaman kontraktor yang memadai pada eksekusi di lokasi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Secara umum Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pendapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu (Aneta. 2010).

2.2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan atau kinerja implementasi kebijakan penanggulangan bencana didefinisikan sebagai suatu tingkat prestasi atau hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam mengantisipasi dan menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi (Londok. 2014).

Adapun model implementasi Kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn yang disebut *Dengan A Model Of The Policy Implementation*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu : Standar kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik organisasi Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik (Sigarlaki. *et al.* 2017). Variabel-variabel dalam implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar kebijakan dilihat dari dua segi aspek yaitu tujuan dan sasaran kebijakan. Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi

kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultural. Jika ukurandan sasaran kebijakan yang akan diterapkan terlalu ideal (utopis), maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan (Kurniawan, Maani. 2019). Dimana rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.

2. Sumber daya, Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tiga sumber daya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dituntut dalam setiap tahap implementasi. Selanjutnya financial yaitu Sumber daya finansial menentukan terlaksananya suatu kebijakan. Jika sumber daya finansial bermasalah maka implementasi kebijakan akan terganggu atau bahkan terhambat. Kemudian terakhir ada waktu (Kurniawan, Maani. 2019).
3. Karakteristik organisasi pelaksana, Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok

dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan(Kurniawan, Maani. 2019). Karakter organisasi pelaksana ini juga meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan(Kurniawan, Maani. 2019).

4. Sikap Para Pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Menurut Kurniawan dan Maani(2019) ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yaitu:
 - a. Pengetahuan, pendalaman dan pengalaman terhadap kebijakan.
 - b. Arah respon para pelaksana apa lebih menerima netral atau menolak.
 - c. Intensitas terhadap kebijakan.
5. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana, Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada para agen pelaksana. Oleh karena itu, Kurniawan dan Maani

(2019) mengatakan bahwa apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh setiap *implementors*.

6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik, Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat kondisi lingkungan eksternal menjadi kondusif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar (Kurniawan, Maani. 2019).

Berdasarkan penjelasan dari teori implementasi Van Meter dan Van Horn, ada enam variabel yang menjadi ukuran berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Akan tetapi penulis hanya mengambil empat dari enam variabel yang disebutkan sebagai bahan untuk penelitian yaitu, (a). Sumber daya yang berfokus pada sumber daya manusia, (b). Karakteristik agen pelaksana, (c). Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana, (d). Lingkungan ekonomi sosial dan politik.

2.2.3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah bencana terjadi dan setelah tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah proses pemulihan pasca bencana. Dalam tahapan pasca bencana ini yang menjadi pelaksanaan program pemerintah yaitu program Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan undang-undang

nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun masyarakat.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sarana utama untuk normalisasi atau berjalan dengannya dengan wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Upaya rehabilitasi misalnya memperbaiki peralatan yang rusak dan memulihkan jalannya perusahaan seperti semula (Alam. *et al.* 2017).

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Proses rekonstruksi tidak mudah dilakukan, oleh karenanya diperlukan kerjasama dan rencana yang baik dari pemerintah serta peran semua anggota masyarakat (Alam. *et al.* 2013).

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Lombok Utara Desa Gondang meliputi kegiatan 4 sektor yaitu: (1) Sektor Perumahan, (2) Sektor infrastruktur, gedung

pemerintahan, (3) Sektor Sosial,(4) Sektor ekonomi produktif (Kurnia. 2017).Guna mendukung program/ kegiatan yang dilaksanakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi diperlukan sumber dana yang cukup. Merujuk pada PP nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pelaksanakan Program Rehabilitasi & Rekonstruksi bersumber pada :

1. APBD Kabupaten/ Kota (Melekat Pada SKPD terkait)
2. APBD Provinsi (Bantuan Sosial, Hibah)
3. APBN (Hibah Murni)
4. Masyarakat
5. Bantuan Luar Negeri

2.2.4. Bencana Alam

Bencana merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam seperti akibat kegagalan teknologi dan ulah manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi yaitu gempa bumi. Bencana alam tersebut membuat Pemerintah sebagai penyelenggaraan negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana dalam pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu Bencana alam yang terjadi di Lombok Utara yaitu bencana gempa bumi. Gempa bumi (*earthquake*) adalah getaran yang terasa dari

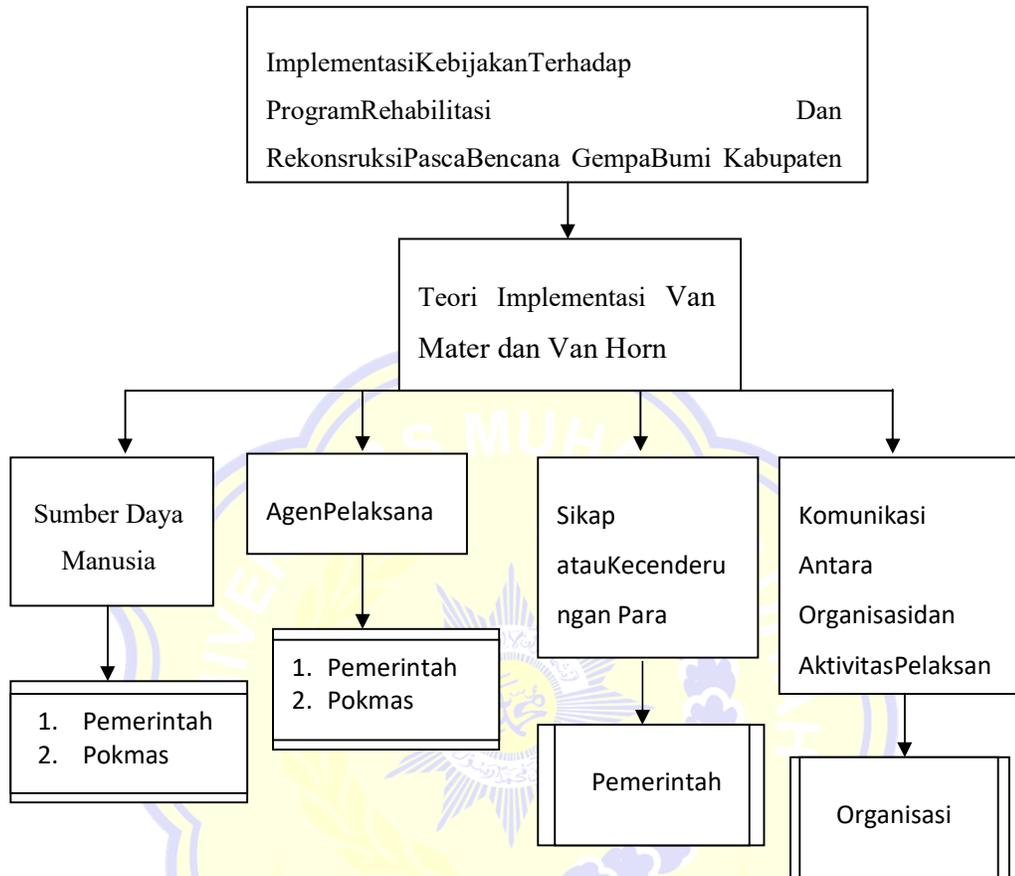
permukaan bumi,cukup kuat untuk menghancurkan bangunan utama dan membunuh ribuan orang.Tingkat kekuatan getaran berkisar dari tidak dirasakan hingga cukup kuat untuk melemparkan orang di sekitar. Seperti halnya pada yang terjadi di daerah Lombok khususnya Lombok Utara mengakibatkan banyak kerugian, Mulai dari pelemahan ekonomi hingga kehilangan keluarga.

2.3. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini kerangka berfikir yang akan dibahas oleh penulis adalah implementasi kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi untuk masyarakat di desa Gondang Kecamatan Gangga yang indikator-indikatornya terdiri dari:

1. Sumber Daya Manusia
2. Karakteristik Agen Pelaksana
3. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana
4. Komunikasi Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Bagan 2.1.
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis

2.4. Teori Konseptual dan Operasional

2.4.1. Definisi konseptual

1. Implementasi

Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008;187) Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Implementasi merupakan suatu

proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan.

2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sarana utama untuk normalisasi atau berjalan dengannya dengan wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana, dan semua aspek kelembagaan baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat.

3. Bencana

Bencana merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam seperti akibat kegagalan teknologi dan ulah manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi yaitu gempa bumi.

2.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu penentuan sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur Variabel. sehingga seorang peneliti dapat mengetahui variable yang akan diteliti.

Tabel 2.2.
Definisi Operasional

Teori	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item
Van Mater dan Van Horn	Implementasi Kebijakan	1. Sumber daya Manusia	1.Pemerintah 2.Pokmas	<ul style="list-style-type: none"> Sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik dilihat dari segi Pemerintah maupun masyarakatnya (Pokmas)
		2. Karakteristik agen pelaksana	1.Pemerintah 2.Pokmas	<ul style="list-style-type: none"> Karakter yang dimiliki oleh para pelaksana baik itu Pemerintah maupun masyarakat (Pokmas)
		3. Sikap atau kecenderungan para pelaksana	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Sikap dari pemerintah terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi
		4. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi yang berjalan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, PUPR dan masyarakat

Sumber : Diolah oleh penulis

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Sugiyono (2015:2). Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan metode Kualitatif Deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:15), teknik penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu". Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang biasa disebut narasumber.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Karena di Desa Gondang adalah salah satu desa yang terkena dampak gempa bumi. Dimana kejadian itu mengakibatkan kerusakan bangunan atau hampir seluruh rumah masyarakat yang ada di Desa Gondang. Adanya program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam membangun kembali rumah masyarakat dalam program tersebut pemerintah juga memberi keluwasan kepada masyarakat dalam pembangunan dengan sistem swakelola. Hal tersebut menarik penulis untuk menelitinya. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini rencananya akan dimulai dari tahap persiapan, observasi, sampai dengan penulisan laporan penelitian. Objek penelitian yang akan menjadi fokus peneliti adalah Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi untuk Masyarakat di Desa Gondang.

3.3. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015:181), “Sumber data penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih dan mengutamakan perpektif, artinya mementingkan pandangan informan yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan”.

Pada penelitian menggunakan dua metode sampling yaitu Metode Purposive Sampling dan Metode Snowball Sampling. Dimana definisi dari

metode Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan melihat pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam memperoleh data yang kita perlukan, atau mungkin dia sebagai pemegang suatu kekuasaan atas apa yang menjadi fokus penelitian sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau sesuatu sosial yang diteliti.

Sedangkan definisi dari metode Snowball sampling, Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Jika diibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Snowball sampling merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus.

3.3.1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015:62), “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau kepada orang yang sedang melakukan penelitian”. Pada penelitian ini yang menjadi informan atau narasumber adalah BPBD, Kepala Desa, Kasi Pelayanan Desa dan Masyarakat Desa Gondang.

Tabel 3.1.

Data Narasumber atau Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	BPBD	2
2	Kepala Desa	1
3	Kasi Pelayanan Desa	1
4	Masyarakat	30
Jumlah		34

Sumber: Diolah oleh penulis

3.3.2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015:62), “Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen”.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:62) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

3.4.1. Observasi

Menurut Nasution 1998 dalam Sugiyono (2015:64) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi. Dengan adanya observasi peneliti dapat

mengetahui pelaksanaan pembangunan rumah bantuan serta koordinasi yang berjalan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, kemudian pemerintah desa dengan masyarakat di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan pengambilan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk lebih mengetahui mengenai data dan fakta-fakta objek yang menjadi fokus penelitian.

3.4.2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015:72).Kemudian Wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya dapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi.Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan atau melalui pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan(Herdiansyah, 2014:118).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang ingin dicari.Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengambilan data dengan metode tanya jawab secara langsung dan mendalam yang ditunjukkan kepada

BPBD, Kepala Desa dan masyarakat Desa yang dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dengan menggunakan panduan wawancara yang menjadi objek penelitian.

Tabel 3.2.

Data Narasumber atau Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	BPBD	2
2	Kepala Desa	1
3	Kasi Pelayanan Desa	1
4	Masyarakat	30
Jumlah		34

Sumber: Diolah oleh penulis

3.4.3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, cerita, sejarah, karya seni, film, dan rekaman. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk membuktikan kebenaran atau keabsahan dari obyek yang diamati atau diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Deskriptif Kualitatif, dimana peneliti diharuskan untuk memaparkan permasalahan berdasarkan hasil penelitian dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2015:83), analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.5.1. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang berupa konsep atau draf yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dilapangan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.5.3. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Tahapan ini merupakan analisis yang dipertajam, membuang, memodifikasi data, sehingga kesimpulan dapat dibuktikan oleh peneliti.

3.5.4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir yang meliputi pemberian makna data yang telah disederhanakan dan disisipkan kedalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan melalui hukum-hukum empiris.